

Program Respon untuk Meminimalisir Kekerasan (Seksual) Pada Lokasi Pengungsian Merapi Di Kabupaten Sleman

Suci Iriani Sinuraya^{1*}

¹ Ilmu Administrasi Negara, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

suciiriani@untidar.ac.id*

* corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received Desember 2023

Revised Desember 2023

Accepted Desember 2023

Keywords

Disaster;
Gender;
Program response;
Violence;
Vulnerable groups.

ABSTRACT

This research aims to study Sleman Regency Gender's Response Program best practice on how they can decrease the (sexual) violence risk to the vulnerable group in the disaster camps. The policy started by involving the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3AP2KB) into the Disaster Command System Management led by Regional Agency for Disaster Management (BPBD) Sleman under the law: Keputusan Bupati Sleman Nomor 17 tahun 2020 tentang Renkontijensi Bencana Gunung Api Merapi. This research uses qualitative descriptive with case study method refer to Sleman practices. Data collecting from literature studies, observation and indepth interview to informans related. The efforts taken by Sleman Regency, succeed in reducing complains and eliminate bad news about (sexual) violence to the vulnerable in disaster camps. Best practice from Sleman regency hopefully can be an inspiration for a conceptual framework for another region in decreasing vulnerable threat and risk for all disaster kind.

PENDAHULUAN

Indonesia Erupsi besar Gunung Merapi pada tahun 2010 telah menimbulkan korban cukup besar baik jiwa maupun harta bagi penduduk di ke-4 wilayah penyangga Gunung Merapi Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kabupaten Magelang, Klaten dan. Di Kabupaten Sleman jumlah pengungsi akibat erupsi Merapi tahun 2010 mencapai sekitar 150.000 (BPBD Sleman, 2011). Selama dalam pengungsian, sejumlah pengalaman buruk dialami pengungsi: menjadi korban kekerasan, korban pelecehan seksual. Tiga orang anak di Kabupaten Klaten menjadi korban pelecehan seksual oleh sukarelawan di lokasi pengungsian Balerante (tempo.co, 10 Desember, 2010). Diduga lebih banyak lagi kasus kekerasan terhadap kelompok rentan yang terjadi dan tidak dilaporkan. Potensi kekerasan meningkat ketika durasi waktu mengungsi semakin panjang, pengungsi harus tinggal berbulan-bulan di barak pengungsi yang menyebabkan sebagian pengungsi ada yang stres dan trauma (Kompas.com, 06 November 2010), kehilangan kendali karena



DOI : 10.24076/jspg.v5i2.1431

Sinuraya, Program Respon untuk Meminimalisir Kekerasan (Seksual) Pada Lokasi Pengungsian Merapi Di Kabupaten Sleman (2023)

ketidakmampuannya untuk mengatasi situasi. Sejumlah pengungsi yang stres karena kebutuhan biologisnya tidak dapat tersalurkan, ada yang kemudian nekat melakukan hubungan badan dengan istrinya di tribun stadion (salah satu tempat lokasi pengungsian di Sleman). Hiburan malam (dangdut) yang dimaksudkan untuk menghibur pengungsi dahulu tidak terseleksi dengan baik sehingga penyanyi berpakaian, melakukan gerakan atau lagu-lagu seksi. Hal tersebut juga menyebabkan pengungsi anak-anak terpapar mendengar hal yang tidak mendidik atau bahkan melihat adegan seksual orang dewasa di pengungsian. Petugas di lapangan yang diwawancarai juga menyampaikan saat itu mendengar terjadinya perilaku pengintipan ketika perempuan dan anak sedang menggunakan kamar mandi. Di samping itu selama dalam pengungsian kelekatan keluarga menjadi berkurang termasuk kelekatan orang tua kepada anak sehingga anak menjadi lebih sulit diatur. Gambaran kerentanan yang mungkin dihadapi oleh kelompok rentan, seperti perempuan dan anak sebetulnya pernah disampaikan oleh UNDP yang mengatakan bahwa *violence against women tends to increase in any emergency, including epidemics. Stress, disruption of social and protective networks, increased economic hardship and decreased access to services can exacerbate the risk of women suffering violence* (UNDP.org, March 24, 2022).

Pengalaman menangani pengungsi erupsi Merapi 2010, 2018 dan 2020 dan belajar dari kejadian adanya berbagai eksekusi negatif di lokasi pengungsian mendorong Pemerintah Kabupaten Sleman menyusun rencana kontijensi (Renkontijensi) darurat Merapi yang pro gender sebagai program respon upaya preventif terjadinya (lagi) eksekusi negatif terhadap pengungsi kelompok rentan selama di lokasi pengungsian. Kabupaten Sleman Cq Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi kabupaten pertama yang menyusun rencana kontijensi bencana dengan melibatkan secara resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) dalam Struktur Komando Darurat Bencana (SKDB). Pelibatan DP3AP2KB dalam manajemen Sistem Komando Darurat Bencana (SKDB) untuk mencegah eksekusi negatif pengungsian terhadap perempuan dan anak seperti kekerasan (seksual) serta memastikan terpenuhinya kebutuhan spesifik kelompok rentan seperti tampon untuk perempuan dan makanan khusus untuk bayi dan anak selama mereka tinggal di lokasi pengungsian. Renkontijensi Pro-gender tersebut tersebut dibadankan dalam Keputusan Bupati Sleman Nomor 17 tahun 2020 tentang Rencana Kontijensi Bencana Gunung Api Merapi pada tanggal 9 Maret 2020.

Penelitian tentang kekerasan seksual terhadap kelompok rentan di lokasi pengungsian yang ditulis oleh para peneliti umumnya terkait dengan pengungsian lintas negara atau pengungsian konflik bersenjata/perang saudara di suatu negara. Sejauh pengamatan penulis penelitian kekerasan (seksual) terhadap perempuan dan anak di lokasi pengungsi akibat bencana alam beserta program responnya belum pernah dilakukan. Tulisan Lugova, Samad, and Haque (2020) yang meneliti pengungsian di Republik Demokratik Kongo, Afrika Timur serta penelitian Wirtz, et.al (2014) dengan mengambil studi kasus di Kolombia, Amerika Selatan menghasilkan simpulan yang hampir sama, meskipun pengungsian di Congo bersifat lintas negara dan pengungsian di Columbia terjadi di negaranya sendiri akibat perang saudara, perebutan kekuasaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pengungsi politik tersebut mengalami berbagai jenis kekerasan berbasis gender dalam situasi konflik dan pengungsian. Kekerasan seksual yang dialami pengungsi bervariasi mulai (ancaman) kekerasan terhadap anggota keluarga, perekrutan



anak, pemerkosaan dan aborsi paksa, penculikan, perbudakan seksual, perdagangan manusia oleh kelompok bersenjata atau fihak lain, serta kekerasan oleh pasangan intim dan eksploitasi seksual. Ketidaksetaraan gender dan penyalahgunaan kekuasaan memperburuk kerentanan para perempuan dan gadis muda di pengungsian terhadap berbagai bentuk kekerasan. Dari kedua penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengungsian yang dilatari situasi krisis karena perang maka ancaman dari pelaku kekerasan terhadap kelompok rentan melibatkan para aktor bersenjata, keluarga maupun pasangannya dalam berbagai bentuk dan cara. Dalam konteks situasi ini, peran relasi kuasa sangat menonjol.

Penelitian Addin Khaerunnisa Juswil (2021) berjudul *The Implementation of IDP Governance in Tackling Sexual Harassment Cases Among Internal Displaced Person* membahas tentang dampak implementasi tata kelola IDP di Indonesia terhadap keamanan perempuan pengungsi. Juswil mengatakan bahwa perempuan merupakan kelompok rentan dalam pengungsian di Indonesia akibat tiadanya kehadiran payung hukum/ aturan. Hal ini dikatakannya berbeda dengan kedudukan anak dimana Pemerintah mengatur perlunya perlindungan khusus untuk anak rentan, termasuk anak yang sedang mengungsi melalui Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 (yang merupakan revisi dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga belum menyebutkan tentang perlindungan khusus kepada perempuan. Namun, pada tahun 2014 keluar Peraturan Kepala (Perka) BNPB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana, meski Perka ini belum bisa memberikan dorongan respon yang kuat pada daerah untuk menindaklanjutinya. Kabupaten Sleman termasuk daerah yang pertama menerapkan perlunya kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan seksual berbasis gender di lokasi bencana yang kemudian dibadankan melalui Keputusan Bupati Sleman Nomor 17 tahun 2020 tentang Rencana Kontijensi (Renkontijensi) Bencana Gunung Api Merapi yang disyahkan oleh Bupati Sleman pada tanggal 9 Maret 2020 (Slemankab.go.id., 9 Maret 2023). Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPA) Nomor 13 tahun 2020 tentang Pelindungan dan Pelindungan Anak dari Kekerasan dalam Bencana sendiri baru disyahkan pada tanggal 29 Desember 2020, yang berarti kehadiran Permen PPA tersebut 'lebih lambat' dibanding dengan kemunculan Keputusan Bupati Sleman Nomor 17 tahun 2020.

Keputusan Bupati Sleman Nomor 17 tahun 2020 tentang Renkontijensi Bencana Gunung Api Merapi tersebut telah mendorong terjadinya perbaikan kelembagaan, tata laksana, perencanaan serta penganggaran untuk mendukung program perlindungan dan pemenuhan kebutuhan kelompok rentan selama dalam pengungsian (dari amuk Gunung Merapi). Kebijakan sejumlah kegiatan guna melindungi kelompok rentan di lokasi pengungsian antara lain dengan adanya standar-operasi-prosedur (SOP) penanganan pengungsi, pendataan dan diperkenalkannya berbagai layanan baru yang memberi kemudahan perempuan dan anak untuk mengakses dan memenuhi kebutuhannya, suatu hal yang sangat penting dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari perlakuan kekerasan (seksual) dalam situasi darurat di lokasi bencana.

Penelitian ini memperbaiki penelitian Juswil (2021) yang mengatakan peraturan



yang melindungi perempuan di lokasi pengungsian belum ada (ketika Juswil melakukan penelitian tersebut pada tahun 2020). Terdapat evidence gap yang diungkap dalam penelitian ini sekaligus menjadi kebaruan (novelty) berupa bukti bahwa pada tahun 2014 BNPB telah mengeluarkan Perka BNPB Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana serta preseden ada pemerintah daerah (Kabupaten Sleman) yang sudah membuat peraturan untuk perlindungan terhadap kelompok rentan di lokasi pengungsian sejak awal tahun 2020, dan diikuti oleh Permen PPA Nomor 13 tahun 2020 tentang Pelindungan dan Pelindungan Anak dari Kekerasan dalam Bencana pada akhir tahun 2020. Sehingga permasalahannya adalah bukannya belum adanya peraturan, namun tidak semua daerah responsif untuk mengatur perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan seksual berbasis gender di lokasi pengungsian. Selanjutnya penulis menyampaikan novelty dengan mengungkap praktik baik berupa program respon yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya memberikan perlindungan bagi kelompok rentan di lokasi pengungsi tersebut.

Pembeda penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 1) penelitian ini membahas tentang pengungsi internal (di dalam negeri) atau IDP; 2) yang tersebut karena ancaman bencana alam (dalam hal ini Gunung Merapi); 3) merupakan studi kasus dengan lokus di Kabupaten Sleman 4) dengan mengulas praktik baik (best practice) kebijakan berupa revisi kelembagaan dan tata kelola yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan seksual di lokasi pengungsi

Tulisan yang secara khusus membahas program respon pemerintah untuk meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan fokus di lokasi pengungsian Gunung Merapi dan dengan lokus di Kabupaten Sleman belum ada. Tulisan ini membahas program yang dilakukan pemerintah (Kabupaten Sleman) sebagai respon atas berbagai kejadian kekerasan (seksual) yang pernah dialami kelompok rentan (perempuan dan anak) di lokasi pengungsian Merapi. Temuan berbagai macam kekerasan (seksual) yang terjadi dan program respon yang diberikan oleh Kabupaten Sleman dengan maksud untuk mengurangi resiko bencana (sosial) di lokasi pengungsian dapat menjadi acuan berbagai daerah lain.

Hambatan yang ditemui penulis dalam penelitian ini ialah jangka waktu obyek yang diteliti, yaitu mulai tahun 2010 saat erupsi besar Merapi sampai dengan tahun 2022. Sebagian data sudah tidak disimpan dinas (kebijakan retensi arsip, arsip yang sudah lebih 10 tahun dipindahkan ke Kantor Arsip Daerah), sebagian petugas sudah pindah atau pensiun, atau data/informasi saat itu tidak terekam dengan baik. Hambatan tersebut diatasi penulis dengan penelusuran berita melalui berbagai media atau tulisan serta kroscek wawancara kepada para pejabat yang dahulu menangani. Terkait dengan penjelasan di atas, pertanyaan penelitian dari tulisan ini adalah bagaimanakah program respon yang dilakukan Kabupaten Sleman untuk meminimalisir kekerasan (seksual) terhadap perempuan dan anak di lokasi pengungsian Gunung Merapi.



METODE

Metode Penelitian ini menggunakan gabungan metode penelitian kualitatif dengan lokus utama di Kab. Sleman, DIY. Data penelitian dikumpulkan dari berbagai tulisan di jurnal, surat kabar maupun buku termasuk buku terbitan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman, Dinas P3AP2KB Kab.Sleman, Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) DP3AP2KB, observasi dan wawancara.

Wawancara mendalam dilakukan dengan informan mantan Kepala UPTD PPA dan mantan Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan mantan Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (saat ini menjabat sebagai Sekretaris DP3AP2KB Sleman), mantan Staf UPTD PPA Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman untuk memperkaya wawasan penulis, karena dalam keseharian tugasnya saat itu mereka aktif terlibat dalam penjangkauan, penanganan dan pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak di Sleman. Wawancara dengan informan Kepala BPBD Sleman (eksisting) dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan dihadapkan pada situasi yang ada dalam pengungsian dan karena BPBD menjadi penanggungjawab penyusunan Rencana Kontinjensi Mitigasi Resiko Bencana yang terintegrasi di Sleman.

Metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi dan analisis studi kasus. John W. Creswell (1998) mengatakan bahwa penelitian studi kasus secara intensif mempelajari latar belakang, efektivitas, dan dampak sesudah kebijakan diimplementasikan melalui 4 hal: (1) mengidentifikasi 'kasus' dari suatu studi, (2) kasus tersebut terikat' oleh waktu dan tempat, (3) pengumpulan datanya menggunakan berbagai sumber informasi guna memberikan gambaran rinci dan mendalam tentang suatu peristiwa; (4) melalui pendekatan studi kasus, peneliti membutuhkan banyak waktu untuk menggambarkan keadaan atau situasi suatu kasus. Pendekatan studi kasus banyak digunakan dalam penelitian kualitatif dan penelitian evaluatif, untuk menjawab pertanyaan *how* (bagaimana) dan *why* (mengapa). Obyek yang diteliti adalah penanganan pengungsi selama tahun 2010-2022..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Sleman mempunyai jumlah penduduk terbanyak di DIY. Pada tahun 2022 jumlah penduduknya 1.147.562 orang (laki-laki: 569.577 orang (49,63%) dan perempuan: 577.985 orang (50,37%) (BPS Kabupaten Sleman, 2023, diolah) dan jumlah warga pendatang non penduduk (mahasiswa dan pekerja yang tinggal di Sleman diperkirakan sekitar 300.0000) (Bupati Sleman dalam berbagai sambutan). Dari jumlah penduduk sebesar 1.147.562 orang tersebut, penduduk Sleman berusia 0-19 tahun sebanyak 321.830 (28,05%) (laki-laki: 164.562 anak dan perempuan: 157.268 anak). Dari data statistik di atas tampak jumlah dan komposisi penduduk Kabupaten Sleman jika ditambah dengan warga pendatangnya cukup banyak, demikian juga jumlah kelompok rentan yang harus dilindungi oleh Pemerintah Kabupaten Sleman cukup besar, yang berarti potensi indeks resiko bencana manusia di Kabupaten Sleman sangat tinggi, apalagi jika diingat bahwa Gunung Merapi adalah gunung api teraktif di dunia sehingga berbagai upaya untuk memberi perlindungan kepada kelompok rentan di lokasi pengungsian menjadi suatu keniscayaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Asako Okai, UN Assistant Secretary-



General and Director, UNDP Crisis Bureau yang mengatakan bahwa 'The statistics are staggering; when disaster strikes, women and children are 14 times more likely than men to die'. Pendapat Okai didasarkan pada sejumlah penelitian bencana yang terjadi di berbagai tempat di dunia, diantaranya peristiwa Tsunami tahun 2004 (Okai,2022).

Selama 7 tahun terakhir (2015-2022) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengkaji dan memetakan ancaman resiko bencana. Hasil pemetaan resiko bencana tahun 2015 Indeks Resiko Bencana Kabupaten Sleman cukup tinggi yaitu 153.60 dan pada tahun 2022 menjadi 80,01 atau masuk kategori sedang (BNPB, 2023) yang menunjukkan kinerja penurunan bencana Kabupaten Sleman cukup baik, resiko bencana turun sebesar 48% selama 8 tahun terakhir. Pencapaian tersebut disumbang oleh beberapa faktor, diantaranya karena adanya intervensi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan melakukan revisi dan perkuatan dalam kebijakan dan kelembagaan, serta tata laksana dan layanannya.

Berbagai pengalaman buruk dan ekses negatif hidup di pengungsian yang dihadapi penduduk selama erupsi besar Merapi tahun 2010, 2017 dan 2020 mendorong pemerintah, perguruan tinggi maupun lembaga swadaya masyarakat tingkat nasional maupun internasional bergandengangan melakukan sejumlah langkah dan upaya guna memperkecil resiko kerugian dan dampak negatif erupsi Merapi. Hal ini karena Gunung Merapi merupakan gunung api teraktif di dunia, karenanya potensi terjadi lagi letusan hebat Merapi seperti pada 26 Oktober 2010 cukup terbuka.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang dikutip VOA (Nurhadi Sucahyo, 26 Oktober 2020) mencatat pada erupsi Merapi tahun 2010 ada 398 korban meninggal, hampir setengah juta orang mengungsi, 3.000 rumah rusak, 2.000 penerbangan dibatalkan dan kerugian material hingga mencapai Rp 3,5 triliun. Republika (18 Jan 2011), menyebut nilai kerusakan dan kerugian mencapai Rp 4,23 triliun dan sebanyak 2.613 keluarga terpaksa mengungsi. Di luar nilai kerusakan dan kerugian materiil serta ratusan penduduk yang menjadi korban meninggal.

Pelajaran penting lain dari kejadian erupsi Merapi 2010-2020 adalah adanya ekses negatif yang teridentifikasi selama pengungsi menghuni tempat penampungan sementara atau di barak pengungsi, dan kebanyakan korbannya adalah kelompok rentan. Terdapat 3 orang anak menjadi korban pelecehan seksual di lokasi pengungsian di Kabupaten Klaten oleh para sukarelawan (Tempo.co,10 Desember 2010). Diduga korban sebenarnya lebih dari itu, termasuk dugaan kekerasan dan pelecehan kepada perempuan serta penyandang difabilitas yang tidak melaporkan dan terekspos. Kekerasan seksual dan pelecehan seksual bisa terjadi di lokasi-lokasi rawan di kamar mandi, tempat cuci, kakus, di jalan dan di barak pengungsian itu sendiri. Korban biasanya akan mengakibatkan trauma dalam hidupnya. Tempo.co (12 November 2010) melaporkan ada sebanyak 515 orang pengungsi korban bencana letusan gunung Merapi mengalami depresi. Depresi tersebut diduga sebabnya bermacam-macam, termasuk ketika pengungsi harus antri untuk menggunakan fasilitas umum yang jumlahnya terbatas (Kompas.com, 07 November 2010). Wawancara dengan Kepala BPBD Sleman (23 September 2022) mengatakan Stadion Maguwoharjo yang menampung pengungsi paling banyak, hanya mempunyai 60 buah kamar mandi/kakus.

Depresi juga terjadi karena pengungsi merasa jenuh/ bosan tinggal di barak yang sempit bersama banyak orang dengan privasi dan kegiatan keseharian terganggu, tidak



dapat mencari nafkah, makanan dan asupan gizi yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan, dan lain-lain. Stres juga bisa terjadi akibat pengungsi tidak bisa menyalurkan kebutuhan biologisnya. Lupien (dalam Yaribeygi, et.al., 2017) mengatakan bahwa stres dapat berdampak pada sistem syaraf seseorang dan dapat menyebabkan perubahan pada bagian-bagian otak. Dengan demikian terdapat dampak yang bersifat domino sebagai eksekutif negatif ketika penduduk mengungsi di lokasi bencana.

Kondisi yang dialami pengungsi makin parah dan kompleks ketika warga harus tinggal berbulan-bulan di barak pengungsi sehingga sebagian pengungsi ada yang jatuh sakit bahkan meninggal di pengungsian (Meilikhah, Medcom.id, 11 Desember 2020). Lamanya waktu tinggal di tempat pengungsian diduga juga menyebabkan adanya perubahan bentuk kelekatan dalam keluarga dan longgarnya pengawasan terhadap anak yang menyebabkan anak lebih sulit diatur atau nakal. Bahkan sebagian anak juga menjadi terpapar melihat adegan romantis/seksual dari orang dewasa di sekitarnya (ketika belum dibangun bilik asmara/bilik ayah bunda) (Wawancara dengan mantan petugas lapangan di pengungsian Merapi tanggal 5 Agustus 2021). Akumulasi permasalahan tersebut menyebabkan pengungsi cepat stres, bertindak di luar nalar, melemahnya kontrol diri yang berdampak pada meningkatnya resiko pada kelompok rentan. Seorang pimpinan lapangan di lokasi pengungsian Merapi Sleman menyampaikan bahwa lamanya waktu tinggal di pengungsian juga menyebabkan sejumlah pengungsi stres karena kebutuhan biologisnya tidak dapat tersalurkan sehingga ada diantaranya yang kemudian nekat melakukan hubungan badan dengan istrinya di tribun stadion (salah satu tempat lokasi pengungsian di Sleman) (Wawancara tanggal 3 September 2023).

Kondisi di masyarakat yang berpandangan bias gender dan adanya budaya patriarki -sistem sosial yang tidak adil, mensubordinasi, mendiskriminasi dan menindas perempuan (Oxford Reference, 2023), mengunggulkan dominasi laki-laki atas perempuan -suatu budaya yang dianut sejumlah besar wilayah di Indonesia termasuk di DIY yang menjadi lokasi pengungsian-, adanya ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, serta kerentanan fisik perempuan sendiri, terlebih di tempat pengungsian yang kondisinya serba darurat dan seadanya- menyebabkan perempuan banyak bergantung pada laki-laki -menjadi sebab semakin kompleksnya situasi bagi kelompok rentan. Dalam situasi darurat, perempuan juga menjadi lebih mudah stres karena kemungkinan adanya perbedaan akses terhadap bantuan. Ketidakmampuan keluarga atau pasangan dalam menghadapi permasalahan yang terjadi (coping) sering memunculkan perilaku menyakiti diri sendiri atau orang lain yang mendorong munculnya sejumlah tindakan tak bernalar seperti kekerasan, pelecehan, perkosaan dan yang lain (Newman, 2021). Sementara itu para korban di lokasi pengungsian diduga enggan melapor karena berfikir situasinya darurat sehingga yang prioritaskan adalah keamanan fisik dan tercukupi kebutuhan makan minum. Perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan pelecehan cenderung diam karena menganggap pengungkapan hal tersebut akan menimbulkan kehebohan, mempermalukan dan merusak harga diri keluarga besarnya (Wawancara dengan 2 orang petugas lapangan dari UPTD PPA pada tanggal 5 dan 8 Agustus 2022 dan pada tanggal 15 September 2021). Sehingga dalam catatan resmi dinas DP3AP2KB maupun BPPD Sleman, belum pernah menangani kasus kekerasan terhadap kelompok rentan di lokasi pengungsian, namun hal tersebut ada dalam ingatan petugas layanan. Secara logika -dan agak mengherankan- jika



memang tidak pernah ada paparan kekerasan (seksual) terhadap perempuan dan anak di lokasi pengungsian Merapi karena sejumlah besar anak yang pernah ikut mengungsi wilayah Kecamatan Cangrangan (salah satu dari 3 wilayah yang warganya sering harus mengungsi ketika terjadi amuk Merapi) diberi terapi trauma healing pada tahun 2012. Pada kesempatan itu anak-anak tersebut juga diberi pengetahuan terkait tindak kekerasan sebagai psikoedukasi (wawancara dengan L, mantan Staf UPT PPA DP3AP2KB (3 September 2023)).

Sementara itu, hasil wawancara penulis dengan mantan petugas lapangan DP3AP2KB Sleman (3 September 2023), pengalaman kekerasan seksual di lokasi pengungsian oleh anak-anak pengungsi bahwa untuk kasus di Sleman, lebih pada terpaparnya anak-anak pada adegan-adegan seksual orang-orang dewasa di sekitarnya (sebelum ada bilik ayah bunda), adanya hiburan malam (dangdut) dimana penyanyinya berpakaian seksi, kamar mandi yang saat itu belum terpisah (sehingga sering terjadi pengintipan kala perempuan atau anak remaja mandi)

Derita pengungsi yang kompleks dan kurang cepat tertangani karena pada saat itu belum ada badan khusus yang ditugasi untuk menangani bencana, petugas yang belum berpengalaman, juga belum ada standar-operasi-prosedur baku penanganan bencana untuk kelompok rentan sehingga layanan yang diberikan pemerintah maupun relawan kurang fokus dan optimal, adakalanya terjadi duplikasi pemberian bantuan di suatu tempat sementara tempat lain belum mendapatkan bantuan.

Banyaknya korban stres dan meninggal dalam erupsi Merapi tahun 2010 diduga diantaranya juga karena kelembagaan yang khusus mengurus bencana di daerah belum terbentuk, sehingga penjangkauan dan penanganan korban serta kemampuan untuk koordinasi dan kewenangan lembaga yang pada saat itu ada/ menangani masih terbatas, tidak optimal. Ketugasan BPBD pada umumnya masih digabung dengan ketugasan urusan bidang lain. Berbagai permasalahan yang kompleks, saling terkait dan karambol tersebut menyebabkan tinggal di pengungsian menjadi bencana bayangan atau merupakan “shadow disaster” bagi kelompok rentan.

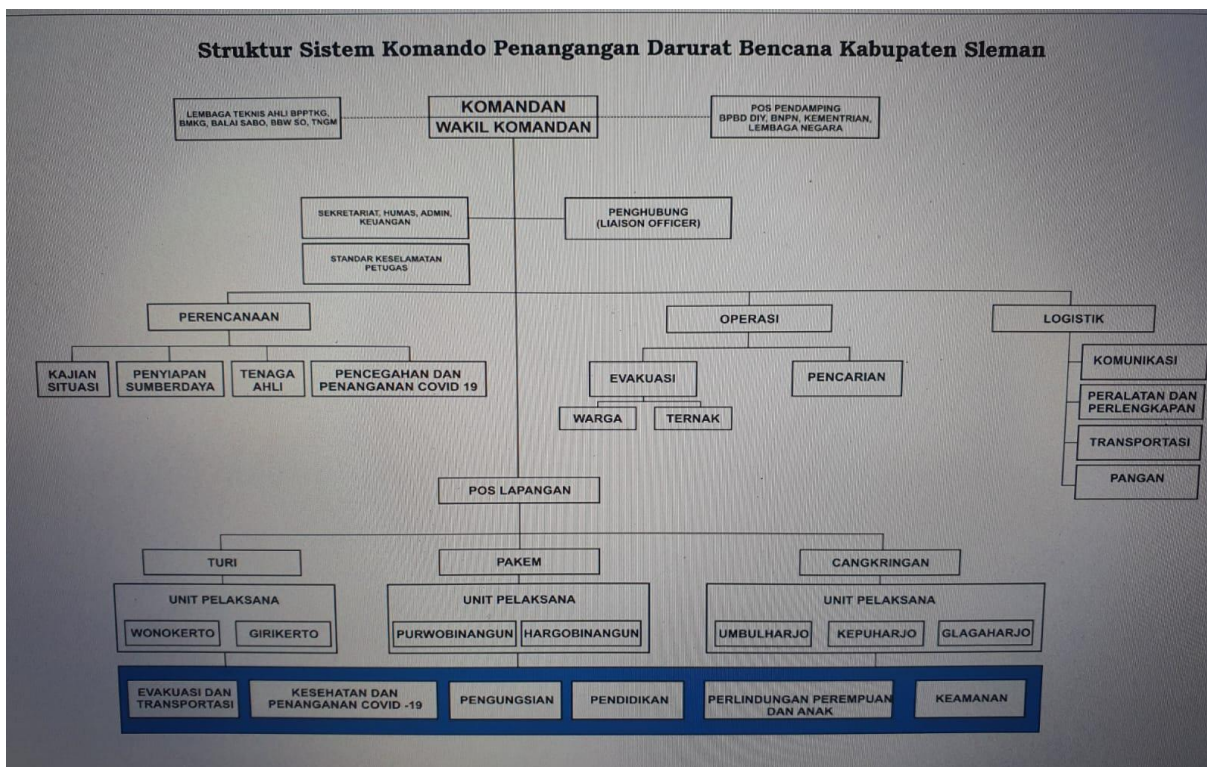
BPBD Kabupaten Sleman baru terbentuk pada tahun 2011 melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2011 (BPBD Sleman, 2023). Sebelumnya ketugasan penanggulangan bencana digabungkan dengan ketugasan satuan polisi pamong praja dan urusan kesatuan kesatuan bangsa. Sejak kelembagaan yang fokus mengurus dan bertanggungjawab pada urusan bencana terbentuk, maka kinerja pengurangan resiko bencana membaik, program yang semakin fokus, ditunjukkan dengan semakin menurunnya resiko bencana

Sleman, merupakan kabupaten penyangga Gunung Merapi yang pertama melibatkan DP3AP2KB dalam Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) Gunung Merapi sebagaimana tampak dalam Keputusan Bupati (Kepbup) Rencana Penanggulangan Bencana Kab.Sleman Tahun 2018-2022 dan disahkan Bupati Sleman pada tanggal 9 Maret 2020 (catatan: ketika terjadi erupsi Merapi sewaktu ada pandemi Covid-19, kebijakan tersebut diperbarui melalui Keputusan Bupati Rencana Kontingensi Erupsi Merapi Adaptasi terhadap Protokol Kesehatan Covid 19 tahun 2020 (BPBD Sleman, 2020). Kedua kebijakan tersebut di atas menyebabkan perlindungan dan penanganan pengungsi kelompok rentan terintegrasi dalam komando besar (wawancara dengan Kepala BPBD



Sleman, 14 Juni 2023).

Keterlibatan DP3A dalam struktur komando penanganan darurat bencana Merapi memungkinkan DP3AP2KB membangun pos-pos aju Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di barak pengungsian Merapi guna membantu, mendampingi dan menjangkau permasalahan kelompok rentan di pengungsian. Dalam Struktur komando Penanganan Darurat Bencana tersebut ketugasan DP3AP2KB antara lain: 1) Memfasilitasi pengaduan dan pelayanan pengungsi/penyintas (terkait perlindungan hak, pemenuhan kebutuhan anak, perempuan dan kelompok rentan lain); 2) Mengendalikan semua kegiatan bagi kelompok rentan yang berada di tempat pengungsian; 3) Memantau dan memastikan pemenuhan hak atas kebutuhan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan penerapan protokol kesehatan Covid-19; 4) Memberikan laporan kegiatan kepada Koordinator PDB Kalurahan (BPBD Sleman, 2020).



Gambar 1. Bagan Struktur Komando Penanganan Darurat Bencana (Merapi) Kabupaten Sleman dengan Pelibatan DP3AP2KB

Sumber: Keputusan Bupati Sleman Nomor 17 tahun 2020 tentang Rencana Kontijensi Bencana Gunung Api Merapi

Pelibatan DP3AP2KB Sleman dimulai sejak penyusunan Renkontijensi Kesiapsiagaan Menghadapi Darurat Merapi oleh BPBD tahun 2019-2020 sampai dengan pelaksanaan di lapangan sebagai bagian dari upaya pencegahan kekerasan atau

diskriminalitas dalam penanganan kelompok rentan di tempat pengungsian. Konsekuensi keterlibatan DP3AP2KB dalam Sistem Komando Pengurangan Dampak Bencana (SKPDB) Kab.Sleman, pada saat ini adalah 1) Tersedia alokasi anggaran untuk penanganan anak dan perempuan di pengungsian sehingga DP3AP2KB bisa melakukan sejumlah program dan kegiatan dalam rangka pencegahan dan perlindungan anak dan wanita di lokasi bencana. 2) Dinas membentuk satuan tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak dengan 3 ketugasan utama, yaitu: pelibatan dalam penanganan psikososial di Pos PPA barak pengungsian, pendataan perempuan dan anak yang terdampak bencana termasuk wabah Covid-19, melakukan rujukan ke Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Sleman -yang merupakan unit layanan terpadu satu pintu (one stop service) masalah keluarga dan anak ataupun UPTD PPA untuk kasus yang membutuhkan penanganan lanjutan. 3) Guna melaksanakan ketugasan tersebut DP3AP2KB Sleman menggandeng sejumlah mitra untuk membuat identifikasi kebutuhan kelompok rentan: anak, wanita, orang tua dan difabel, dimulai dengan menyediakan data pilah anak di pengungsian yang ter-update. Pelibatan Forum Anak dan organisasi wanita mitra DP3AP2KB tersebut guna menyerap dan mengakomodir suara/aspirasi serta kebutuhan anak dan wanita. 4) Tersedianya SOP Penanganan Perempuan dan Anak di Pengungsian. 5) Mengkoordinasikan relawan yang akan berkontribusi dalam kegiatan perempuan dan anak di barak pengungsi guna menghindarkan/mencegah hal yang tidak diinginkan, seperti oknum yang ingin memanfaatkan situasi rentan untuk mencari korban perempuan atau anak yang akan diperjualbelikan atau sebagai pekerja seks (Tindak Pidana Perdagangan Orang/TPPO) atau mencegah paedofil berkeliaran dengan berselubung sebagai relawan; mencegah bantuan/dukungan tenaga maupun bentuk lain yang tidak stabil seperti tenaga relawan di suatu hari cukup banyak namun di hari yang lain krisis relawan, sehingga perlu diatur siapa bertugas di hari apa, kapan serta bentuk bantuan/dukungan seperti apa, guna kesinambungan dukungan untuk pengungsi; mengkoordinasikan relawan yang akan berkontribusi dalam kegiatan perempuan dan anak di Barak Pengungsian ini memungkinkan dilaksanakannya Kode Etik Pendampingan Anak dan penandatanganan Kode Etik Perlindungan Anak (Safe Guarding), diantaranya larangan mengekspose di media apapun: gambar, video serta identitas anak di pengungsian. 6) Keterlibatan DP3AP2KB juga memungkinkan Dinas P3AP2KB dapat mengkoordinasikan bantuan spesifik untuk anak dan perempuan seperti dukungan anggaran untuk mengcover keperluan spesifik perempuan seperti penyediaan pembalut/tampon dan lain-lain; logistik (makan minum) untuk perempuan dan anak lebih bisa disesuaikan dengan kebutuhan: bayi, anak, orang tua, sehingga terhindar satu jenis masakan untuk semua kategori pengungsi (one food for all) guna mencegah anak atau orang tua dari penyakit diare dan lain sebagainya; penanganan pengungsi kelompok rentan seperti perempuan dan anak lebih fokus dan terarah. Dinas bisa menyediakan ruang kreatifitas bagi anak dan perempuan, melatih relawan anak (dari Forum Anak Sleman atau relawan anak yang lain) yang akan ditugaskan di barak pengungsian; memberikan pelatihan keterampilan bagi perempuan pengungsi. 7) Sejak Covid meningkat di Kabupaten Sleman, pada lokasi pengungsi Merapi dibangun ruang (berbentuk kube), antar keluarga terpisah untuk memudahkan koordinasi antar anggota keluarga dan pengawasan anak, serta untuk mencegah penularan virus. 8) Terdapat tenda khusus untuk Trauma Healing. Kegiatan trauma healing dilakukan oleh

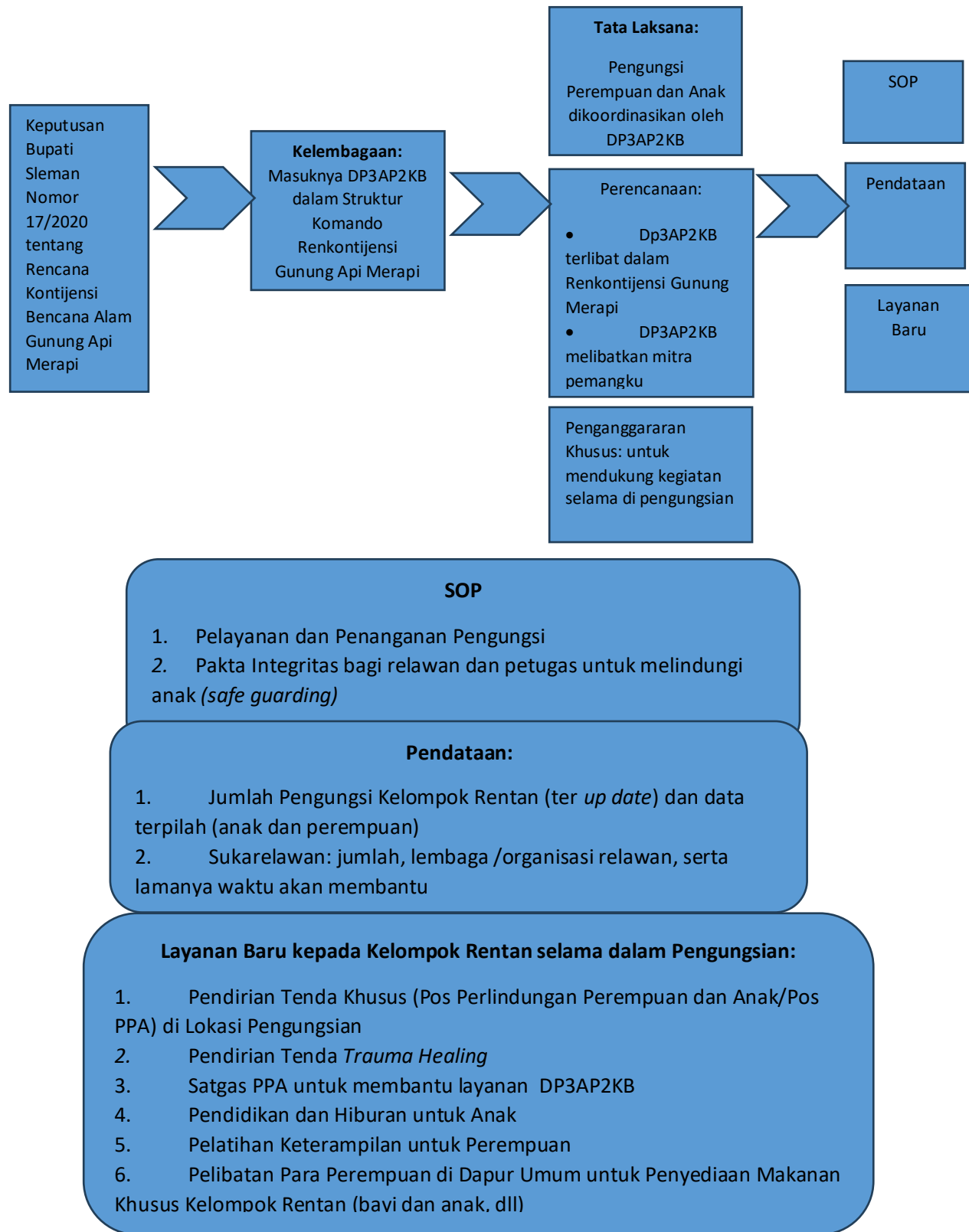


psikolog Dinas P3AP2KB yang bertugas di Puspaga dan di UPD PPA serta bekerjasama dengan Himpunan Psikolog (Himpisi) DIY maupun Sleman, perguruan tinggi yang mempunyai fakultas psikologi yang berminat membantu. 9) Terdapat Sekolah Darurat untuk keberlanjutan sekolah serta aktivitas kepada anak selama dalam pengungsian. Sekolah darurat ini dihadirkan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan serta Dinas Kesehatan dan atau dengan Lembaga swadaya masyarakat serta kelompok masyarakat yang peduli. 10) Dibangun kamar mandi khusus untuk perempuan dan anak, terpisah dari kamar mandi untuk laki-laki. Upaya ini merupakan salah satu pencegahan terjadinya pelecehan /kekerasan seksual kepada kelompok rentan selama kelompok rentan antri atau sedang menggunakan kamar mandi. 11) Dibangunnya bilik Ayah-Bunda, kamar khusus yang disediakan bagi pasangan suami istri untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Upaya ini juga untuk menghindarkan agar anak tidak terpapar melihat adegan seksual (tidak senonoh) yang dilakukan pasangan pengungsi di tempat terbuka karena ketiadaan tempat untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya.

Keputusan Bupati Sleman Nomor 17 tahun 2020 tentang Rencana Kontijensi Bencana Gunung Api Merapi telah mendorong terjadinya perbaikan dalam 3 hal yakni kelembagaan, tata laksana dan perencanaan serta penganggaran sehingga meningkatkan sejumlah layanan yang dsediakan. Perubahan-perubahan tersebut terdapat pada gambar 2. Daya tanggap Kabupaten Sleman untuk melakukan eliminasi resiko kelompok rentan dilokasi pengungsian dengan membuat payung hukum dan sejumlah program ikutannya telah menjadikan Kabupaten Sleman menjadi pionir dalam upaya pencegahan kekerasan (seksual) dan diskriminalitas dalam penanganan kelompok rentan di lokasi pengungsian. Langkah maju ini menjadi tonggak penting perlindungan kelompok rentan di lokasi pengungsian dan sejalan dengan peringatan dari UNDP bahwa dalam setiap situasi darurat apapun resiko kerentanan perempuan dan anak menghadapi kekerasan semakin meningkat (UNDP.org, March 24, 2022).

Keberhasilan tersebut juga menyebabkan keluhan-keluhan terkait dengan kekerasan (seksual) yang dialami perempuan dan anak menurun, meskipun data resmi tentang hal tersebut tidak tersedia karena belum pernah ada pendataan secara resmi kekerasan terhadap perempuan dan anak di lokasi pengungsian. Namun dari wawancara dengan sejumlah petugas yang pernah terlibat pada penanganan pengungsi Merapi 2020 (wawancara dengan pimpinan petugas lapangan di lokasi bencana Merapi Sleman, M dan S tanggal 3 September) serta monitoring berita dari berbagai media cetak maupun elektronik, keluhan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak boleh dikatakan sudah tidak ada beritanya lagi.





Gambar 2. Perubahan Kelembagaan, Tata Laksana, Perencanaan, Penganggaran dan Layanan

Komitmen dan langkah Kabupaten Sleman dalam mengurangi resiko bencana tersebut secara signifikan ikut menyumbang dalam penurunan indeks resiko bencana Sleman yang semula di atas 153 pada tahun 2015, turun signifikan menjadi 'hanya' 80,01 pada tahun 2022. Hal ini karena Sleman dianggap telah terjadi peningkatan kapasitas masyarakat maupun pemerintah melalui berbagai kegiatan yang menyebabkan Indeks Ketahanan Daerah naik, sebaliknya indeks resiko bencana di Sleman turun. Langkah maju dan praktek baik perlindungan kelompok rentan di lokasi bencana ini diapresiasi oleh BNPB. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto yang mengatakan bahwa respon tanggap bencana masyarakat lereng Merapi sangat baik. Sleman meski mempunyai potensi kerawanan bencana alam yang cukup tinggi namun upaya pencegahan dan persiapan perlindungan yang dilakukan telah cukup baik sehingga praktek baik ini perlu didesiminasikan kepada daerah lain. Pernyataan itu disampaikan pada saat jumpa pers kegiatan puncak peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana di lereng Gunung Merapi pada 26 April 2022 (Antaraneews.com, 26 April 2022).

KESIMPULAN

Erupsi Merapi menyebabkan masyarakat di lereng Merapi sering harus mengungsi ke barak-barak pengungsian. Jika letusan Merapi besar maka kerugian materiil dan jiwa penduduknya juga meningkat. Besar serta lamanya erupsi mempengaruhi lama tinggal masyarakat di pengungsian. Lamanya masyarakat tinggal di barak pengungsi membawa dampak negatif diantaranya kekerasan ataupun pelecehan seksual kepada kelompok rentan. Erupsi Merapi 2010 dan tahun 2017/2018 telah memberikan sejumlah pelajaran penting, terutama dengan munculnya permasalahan kekerasan seksual terhadap anak, pelecehan terhadap perempuan serta terpaparnya anak pada adegan seksual atau tontonan tidak sehat yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitarnya. Lamanya waktu tinggal di tempat pengungsian juga menyebabkan adanya perubahan bentuk kelekatan dalam keluarga dan longgarnya pengawasan terhadap anak yang menyebabkan anak menjadi lebih sulit diatur (nakal). Sedangkan bagi orang dewasa, menyebabkan mereka tidak dapat bekerja/mencari makan, privasi serta kebutuhan individu terganggu, termasuk kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis yang tak tersalur menyebabkan orang mudah stres ditambah kemampuan kontrol diri (coping) yang rendah menyebabkan orang (kebanyakan pasangan intim) melakukan kekerasan (seksual) terhadap pasangannya atau lain di sekitarnya. Akumulasi permasalahan tersebut memicu pengungsi mudah stres atau depresi, melemahnya kontrol diri sehingga mereka bisa bertindak di luar nalar yang berdampak pada meningkatnya resiko pada kelompok rentan. Asako Okai, mengatakan bahwa dalam situasi bencana resiko perempuan dan anak (untuk meninggal) 14 kali lebih besar dibanding laki-laki. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam setiap situasi bencana (apapun), kerentanan yang dihadapi perempuan dan anak meningkat sehingga upaya mitigasi, pencegahan dengan SOP yang jelas, ketat dan terukur perlu dilakukan guna mengeliminir eksekusi negatif tinggal dipengungsian terutama bagi kelompok rentan. Berbagai permasalahan yang kompleks, saling terkait dan karambol (bersifat domino) tersebut menyebabkan tinggal di pengungsian bagi kelompok rentan menjadi bencana bayangan (shadow disaster) baru. Belajar dari pengalaman menangani dan mengamati dampak bencana erupsi Merapi tahun 2010, Kabupaten Sleman Cq BPPD Sleman



menyusun Renkontijensi terintegrasi tahun 2019-2020, dengan melibatkan sejumlah OPD, termasuk DP3AP2KB dalam Sistem Komando Pengurangan Dampak Bencana melalui Keputusan Bupati Sleman Nomor 17/2020 tentang Rencana Kontijensi Bencana Alam Gunung Api. Keputusan Bupati Sleman Nomor 17/2020 tentang Rencana Kontijensi Bencana Alam Gunung Api telah menjadi payung kebijakan bagi dilakukannya sejumlah perbaikan di bidang kelembagaan, tata kelola dan perencanaan dan penganggaran dan perbaikan (penambahan) layanan selama masyarakat Sleman sedang mengungsi. Pelibatan DP3AP2KB dalam SKPDB, merupakan bagian dari upaya pencegahan (terulangannya) kekerasan dan diskriminalitas kelompok rentan di lokasi pengungsian. Hasilnya, penanganan pengungsi kelompok rentan khususnya wanita dan anak menjadi lebih baik (Pro gender) sejak tahun 2020 diantaranya dengan adanya Pos khusus Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), dibentuknya pedoman standar operasi prosedur (SOP) dalam sejumlah langkah dan tindakan, penyeleksian bantuan tenaga dan barang untuk pengungsi, kamar mandi laki-perempuan terpisah, adanya tenda trauma healing, tenda kreativitas perempuan dan anak, serta menu makanan yang berbeda untuk orang dewasa dan anak, dibangunnya bilik ayah bundadi lokasi pengungsian.

Berbagai program kebijakan responsif gender untuk mencegah terjadinya (lagi) kekerasan (seksual) pada kelompok rentan di lokasi pengungsian menunjukkan hasil yang baik. Indikasinya adalah tiadanya (lagi) aduan/keluhan yang masuk masuk ke posko atau tenaga pendamping, maupun pemberitaan miring di media. Sehingga program respon Pro gender Pemerintah Kabupaten Sleman menunjukkan negara hadir dan menjadi upaya ganda kebijakan (double action)/ upaya ekstra (extra effort) yang terbukti bermanfaat melindungi kelompok rentan dari resiko kekerasan (seksual) dilokasi pengungsian. Berbagai kebijakan dan tindakan perlindungan kelompok rentan di pengungsian serta berbagai kebijakan penguatan kapasitas masyarakat lain yang dilakukan Kabupaten Sleman telah menyebabkan indeks resiko bencana Sleman yang semula di atas 153 pada tahun 2015, turun signifikan menjadi 'hanya' 80,01 pada tahun 2022 Praktek baik dari Sleman diapresiasi sejumlah pihak diantaranya Unicef-Yayasan Redr serta Kepala BNPB, sehingga perlu disosialisasikan agar bisa direplikasi ke sejumlah tempat rawan bencana yang lain.

REFERENSI

- Antaraneews.com, 26 April 2022. <https://www.antaranews.com/berita/2842545/bnpb-respon-tanggap-bencana-masyarakat-lereng-merapi-sangat-baik>
- Asako Okai, UN Assistant Secretary-General and Director, UNDP Crisis Bureau Women are hit hardest in disasters, so why are responses too often gender-blind? Disaster response and recovery doesn't go far enough in addressing their specific needs, March 24, 2022. <https://www.undp.org/blog/women-are-hit-hardest-disasters-so-why-are-responses-too-often-gender-blind>.
- BNPB, 2020, IRBI Indeks Resiko Bencana Indonesia 2020. <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/Dit%20P4K-PRL/Kumpulan%20Buku/BUKU%20IRBI%202019.pdf>.
- BNPB, 2023, IRBI Indeks Resiko Bencana Indonesia 2022, Vol 01, Nomor 01, Januari 2023. ISSN 2985-6922. <https://inarisk.bnpb.go.id/pdf/BUKU%20IRBI%202022.pdf>



- BPBD Sleman, 2011. <https://bpbd.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2017/11/Tanggap-Darurat-Merapi-2010.pdf>
- BPBD Sleman, 2023. <https://bpbd.slemankab.go.id/tupoksi/>
- BPBD Sleman, 2020, Rencana Kontingensi Erupsi Gunungapi Merapi Adaptasi terhadap Protokol Kesehatan Covid-19. <https://bpbd.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2023/04/Rencana-Kontingensi-Erupsi-Gunungapi-Merapi-Adaptasi-Terhadap-Protokol-Kesehatan-Covid-19.pdf>
- Braithwaite, Salehyan, dan Savun (2019), Refugees, forced migration, and conflict: Introduction to the special issue, Volume 56, Issue 1. <https://doi.org/10.1177/0022343318814128>
- Creswell, John W. 1998, Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing. Among Five Traditions, California: Sage Publication.
- detikNews, 30 Oktober 2010, Pengungsi Keluhkan Minimnya Sarana MCK. <https://news.detik.com/berita/d-1479798/pengungsi-keluhkan-minimnya-sarana-mck>
- dw.com, 29 September 2021, 'Puluhan Staf WHO Diduga Terlibat Pelecehan Seksual di Kongo, 29 September 2021'. <https://www.dw.com/id/puluhan-staf-who-diduga-terlibat-pelecehan-seksual-di-kongo/a-59346301>
- Hayon, Yohanes Pande, 1997, Perkembangan kebudayaan dalam perspektif filsafat sejarah: sebuah kajian tentang pemikiran Arnold J. Toynbee, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, thesis. url: <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=78357>
- <https://redr.or.id/program-adaptive-social-protection-kabupaten-sleman/>
- In-depth interview with the Head of BPBD Sleman (existing), Mrs. M Oktober 15, 2022 and June, 14, 2023 and September 3th, 2023
- In-depth interview with the former Head of UPTD PPA/Head of Section for Fulfillment Children's Right, Mrs. S on August 5 and 8, 2022 and September 3th, 2023
- In-depth interview with Mr. L, former Staff of UPTD PPA Sleman, 3 September 2023.
- In-depth interview with Mrs. KRB former Head of Division of Woman Empowerment DP3AP2KB Sleman, September, 3 th, 2023
- In-depth interview with the Head of Child Protection DP3AP2KB Sleman, Mrs. SB on September 15, 2021.
- Juswil, Addin Khaerunnisa (2021), The Implementation of IDP governance in Tackling Sexual Harassment Cases Among Internal Displaced Person. S2 thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Kabupaten Sleman Dalam Angka, BPS, 2023
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Glossary Ketidakadilan Gender, 2023. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/23>.
- Keputusan Bupati Sleman Nomor 17 tahun 2020 tentang Rencana Kontingensi Bencana Gunung Api Merapi.
- Kompas.com, 06 November 2010, Duh, Pengungsi Merapi Mulai Stres. <https://megapolitan.kompas.com/read/2010/11/06/18185281/duh.pengungsi.merapi.mulai.stres>



- Kompas.com, 07 November 2010, Kamar Mandi dan Kakus Jadi Masalah. <https://biz.kompas.com/read/2010/11/07/02541896/kamar-mandi-dan-kakus-jadi-masalah>
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPBD Kabupaten Sleman Tahun 2021-2022. <https://bpbd.slemankab.go.id/wp-content/uploads/2022/02/LKjIP-2021.pdf>
- Levels of domestic violence increase globally, including in the Region, as COVID-19 pandemic escalates. <https://www.emro.who.int/violence-injuries-disabilities/violence-news/levels-of-domestic-violence-increase-as-covid-19-pandemic-escalates.html>
- Lugova, Samad, and Haque (2020), Sexual and Gender-Based Violence Among Refugees and Internally Displaced Persons in the Democratic Republic of the Congo: Post-Conflict Scenario. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7734039/> Published online 2020 Dec 9. doi: 10.2147/RMHP.S283698
- Medcom.co, 11 Desember 2020, Populer Daerah; Pengungsi Erupsi Gunung Mulai Terserang Penyakit hingga Pelaku Mutilasi Korban Kejahatan Seksual. <https://www.medcom.id/nasional/daerah/5b2eXa6N-populer-daerah-pengungsi-erupsi-gunung-mulai-terserang-penyakit-hingga-pelaku-mutilasi-korban-kejahatan-seksual>
- Menez, Jorge Rodríguez and Safranoffin, Ana, 2012, 'Violence against Women in Intimate Relations: A Contrast of Five Theories', European Journal of Criminology.
- Newman, Caroline (2021), The pandemic is increasing intimate partner violence. Here is how health care providers can help. October 26, 2021. <https://www.uab.edu/news/health/item/12390-the-pandemic-is-increasing-intimate-partner-violence-here-is-how-health-care-providers-can-help>
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Republika, 18 Jan 2011, Kerugian Akibat Letusan Merapi Capai Rp 4,23 T. <https://www.republika.co.id/berita/159028/kerugian-akibat-letusan-merapi-capai-rp-423-t>
- Solopos.com, 24 Oktober 2016: "Bencana Sleman: Ada 7 Bencana yang Mengancam Wilayah Sleman". <https://www.solopos.com/bencana-sleman-ada-7-bencana-yang-mengancam-wilayah-sleman-763193>
- Tempo.co, 11 November 2010, "Dampak Merapi, Macan Tutul dan Monyet Turun ke Pemukiman"
- Tempo.co, 12 November 2010, Ratusan Pengungsi Merapi Depresi. <https://nasional.tempo.co/read/291565/ratusan-pengungsi-merapi-depresi>
- Tempo.co, Jumat, 10 Desember, 2010, Pengungsi Merapi Jadi Korban Pelecehan Seksual Relawan. <https://nasional.tempo.co/read/298140/pengungsi-merapi-jadi-korban-pelecehan-seksual-relawan>
- Trisnawati, Opy dan Widiensyah, Subhan, Kesetaraan Gender terhadap Perempuan dalam Bidang Pendidikan di Perguruan Tinggi, Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, Bol 13 No.2 tahun 2022, e-ISSN:2087-8451, pISSN;2715-1247. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/article/view/54606>
- UU No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.



UU No 23 tahun 2022 Jo Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

UNHCR. 2011, Age, Gender and Diversity Policy: Working with people and communities for equality and protection. <https://www.unhcr.org/media/policy-age-gender-and-diversity-accountability-2018>)

UNHCR, The UN Refugee Agency, The Office of the High Commissioner for Human Rights (OCHCR) 2023, Guiding Principles on Internal Displacement, 2001. <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-internally-displaced-persons/about-internally-displaced-persons>

Wihdan Hidayat, Republika.co, 29 Nov 2020, Mengintip Bilik Ayah Bunda di Pengungsian Gunung Merapi. <https://visual.republika.co.id/berita/qkfy9q283/mengintip-bilik-ayah-bunda-di-pengungsian-gunung-merapi?>

Wirtz, Pham, Glass, et.al., (2014), Gender-based violence in conflict and displacement: qualitative findings from displaced women in Colombia, Conflict and Health volume 8, Article number: 10

Yaribeygi, Habib, et.al., Jul 21, 2017, 'The impact of stress on body function: A review. doi: 10.17179/excli2017-480. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5579396/>

